

PERLINDUNGAN HUKUM RADIOGRAFER DALAM PELAYANAN KESEHATAN PADA STRUKTUR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Oleh:
Aldy Ferdinand Rizaldy
E1A016209

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan perlindungan hukum radiografer dalam memberikan pelayanan kesehatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif kualitatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan analitis (*Analytical Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah inventarisasi hukum positif, sinkronisasi hukum dan penemuan hukum *in concreto*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari studi kepustakaan dan studi dokumenter.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai perlindungan hukum radiografer dalam memberikan pelayanan kesehatan telah menunjukkan taraf sinkronisasi. Artinya, bahwa antara peraturan yang lebih rendah derajatnya telah sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya dan peraturan yang lebih tinggi derajatnya menjadi dasar bagi pembentukan peraturan yang lebih rendah. Bentuk perlindungan hukum radiografer dalam memberikan pelayanan kesehatan meliputi jaminan pengaturan memilih dan dipilih dalam organisasi profesi, jaminan pengaturan mengeluarkan pendapat, jaminan pengaturan mendapatkan perlindungan dan pembelaan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai peraturan yang berlaku, jaminan pengaturan memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari pemberi kerja dan penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya, jaminan pengaturan melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan kewenangan, jaminan pengaturan memperoleh imbalan jasa, jaminan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama, jaminan pengaturan pengembangan profesi, jaminan pengaturan untuk menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan yang bertentangan dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, kode etik, atau ketentuan perundang-undangan, dan jaminan pengaturan hak lainnya.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum Radiografer, Pelayanan Kesehatan, Sinkronisasi*

LEGAL PROTECTION OF RADIOGRAPHER IN HEALTH SERVICES IN THE STRUCTURE OF LEGISLATION INDONESIA

By:
Aldy Ferdinand Rizaldy
E1A016209

ABSTRACT

The study aims to determine synchronization of legal protection arrangements and forms of legal protection for radiographer in carrying out health services. The research method used in this study is a *qualitative normative juridical method with the statutory approach method, analytical Approach, and conceptual approach*. The research specifications used are *legal inventory, legal synchronization dan legal discovery in concreto*. The type of data used is *secondary data obtained from literature and documentaries*.

Based of the research it can be concluded that the regulation regarding the legal protection of radiographers in carrying out health services has shown a degree synchronization. This mean that between a lower level of regulation is in accordance with a higher deree regulatioan and a higher degree of regulation becomes the basis for the formation of a lower regulation. Forms a legal protection for radiographer in carrying out helath services included guaranteeing that ther right to vote, electing and being elected in professional organizations, guaranteeing legal protection arrangements, guaranteeing arrangements for complete and correct information from service recipeints or their families, guaranteeing arrangement carry out tasks in accordance with competence and authority, guarantee service compensation arrangements, guarantee protection arrangements for occupational safety and healt, guarantee regulatory arrangement in accordance with human dignity and values, morals, decency, and religious values, guarantee for professional development arrangements, guarantees arrangements to reject in wishes of recipients of health services that conflict with competence, authority, professional standards, code of ethics, services standards, standard operating produces, or staturoty provisions, and guaratees for other right setting.

Keyword : Legal Protection of Radiographer, Health services, synchronization